



PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

Disampaikan oleh

Dr. Ir. Ferry Sofwan Arif, M.Si
Inspektur Provinsi Jawa Barat

Dalam Acara Webinar
“Membangun Budaya Sadar Risiko”
2 Juni 2020



INSPEKTORAT

PANDEMI COVID - 19



PERKEMBANGAN PANDEMI COVID-19 Dunia dan Nasional

Status: 31 Mei 2020

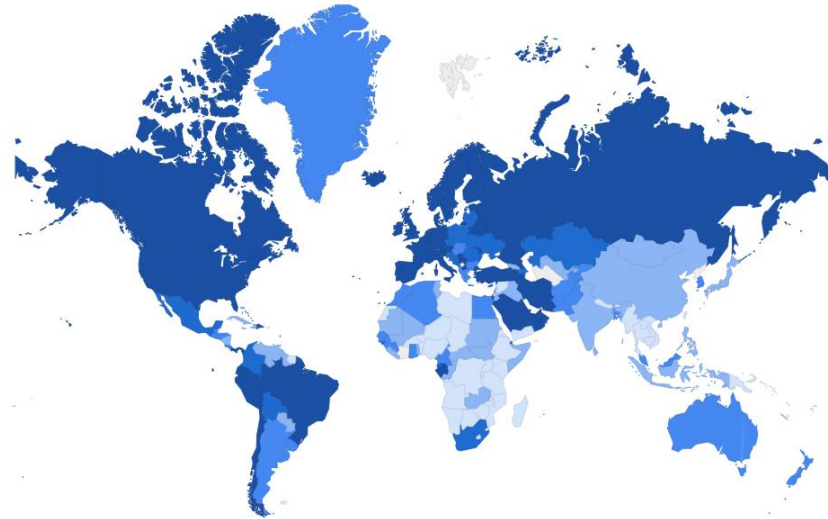


Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN COVID-19
JAWA BARAT

DUNIA



6.153.380

Kasus Terkonfirmasi

3.047.961

Dalam Perawatan

2.734.549

Sembuh

370.870

Meninggal

Sumber: coronavirus.thebaselab.com per tgl 31 Mei 2020, jam 08.35 WIB

NASIONAL



25.773

Kasus Terkonfirmasi

17.185

Dalam Perawatan

7.015

Sembuh

1.573

Meninggal

PROVINSI	TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
DKI Jakarta	7.229	2.005	516
Jawa Timur	4.613	589	372
Jawa Barat	2.231	616	144
Sulawesi Selatan	1.510	564	72
Jawa Tengah	1.366	355	70

Sumber: covid19.go.id per tgl 31 Mei 2020, jam 08.14 WIB

**INSPEKTORAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT**



PERKEMBANGAN PANDEMI COVID19 Provinsi Jawa Barat

Status: 31 Mei 2020

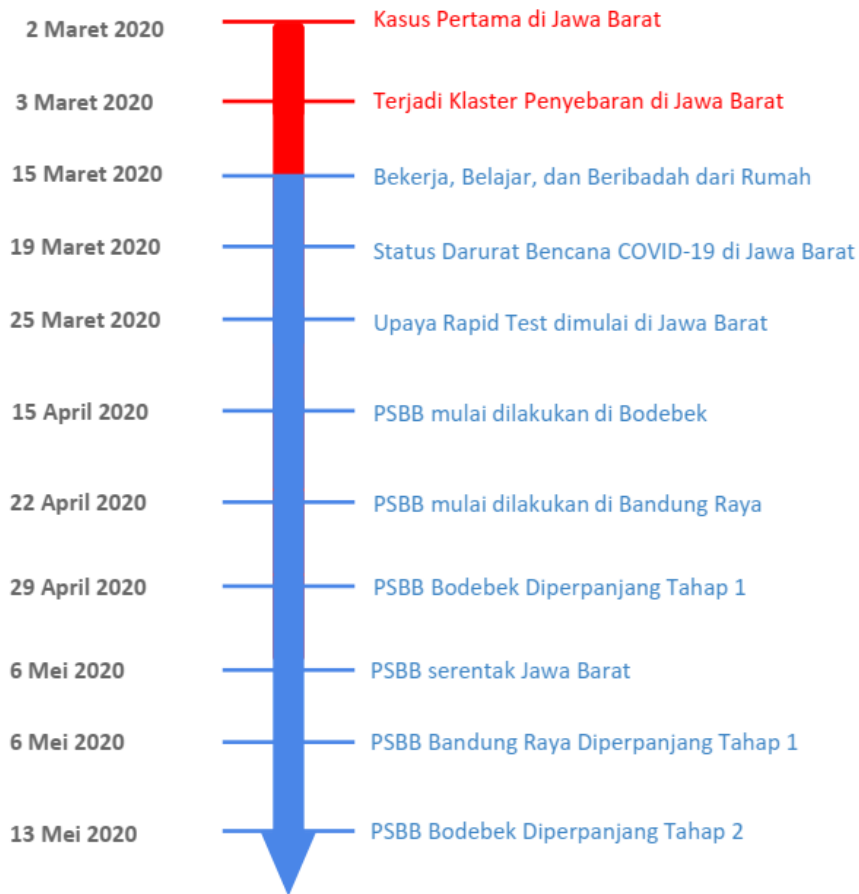


Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN COVID-19
JAWA BARAT

Milestone Penting



Dashboard Kasus COVID-19 Provinsi Jawa Barat

*Update Terakhir: Minggu, 31 Mei 2020 08.44

TERKONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL
Jawa Barat 2.231 +20	Jawa Barat 616 +24	Jawa Barat 144 +2
Indonesia 25.773 +557	Indonesia 7.015 +523	Indonesia 1.573 +53

ODP (Orang Dalam Pemantauan)	PDP (Pasien Dalam Pengawasan)
5.060 (10,04%) 45.332 (89,96%) 50.392	1.710 (20,43%) 6.658 (79,57%) 8.368
Proses Pemantauan Selesai Pemantauan Total ODP	Proses Pengawasan Selesai Pengawasan Total PDP

Kab/Kota	Terkonfirmasi	Sembuh	Meninggal
Kota Bekasi	464	160	29
Kota Depok	424	148	24
Kota Bandung	305	55	36
Kab. Bogor	176	19	8
Kab. Bekasi	173	59	9

Sumber: pikobar.jabarprov.go.id per tgl 31 Mei 2020, jam 08.44 WIB



INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT



Peta Level Kewaspadaan Kabupaten/Kota di Jawa Barat (Data 26 Mei 2020)



Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN COVID-19
JAWA BARAT



PETA TINGKAT SISTEM KEWASPADAAN COVID-19 PER 26 MEI 2020 PROVINSI JAWA BARAT



SKALA 1:660.736
0 12.5 25 50 75
Kilometer

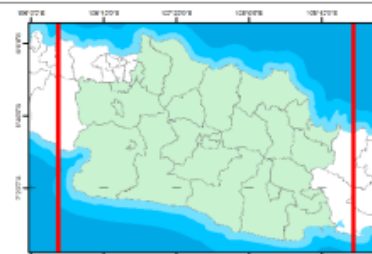
Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horizontal : WGS84 - Zone 48S

Legenda

Jawa Barat

Leveling

- 1 (Rendah)
- 2 (Moderat)
- 3 (Cukup Berat)
- 4 (Berat)
- 5 (Kritis)



SUMBER DATA:
- Peta Batas Administrasi Jawa Barat

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
COVID-19 DI JAWA BARAT
DIVISI PERENCANAAN, RISET, DAN EPIDEMIOLOGI



NO	LEVEL – 2
1	Kabupaten Bandung Barat
2	Kabupaten Ciamis
3	Kabupaten Cianjur
4	Kabupaten Cirebon
5	Kabupaten Garut
6	Kabupaten Kuningan
7	Kabupaten Majalengka
8	Kabupaten Pangandaran
9	Kabupaten Purwakarta
10	Kabupaten Sumedang
11	Kabupaten Tasikmalaya
12	Kota Banjar
13	Kota Cirebon
14	Kota Sukabumi
15	Kota Tasikmalaya
NO	LEVEL – 3
1	Kabupaten Bandung
2	Kabupaten Bekasi
3	Kabupaten Bogor
4	Kabupaten Indramayu
5	Kabupaten Karawang
6	Kabupaten Subang
7	Kabupaten Sukabumi
8	Kota Bandung
9	Kota Bekasi
10	Kota Bogor
11	Kota Cimahi
12	Kota Depok

Pemetaan Risiko Kesehatan dan Dampak Ekonomi



		I M P A C T	
		LOW	HIGH
L I K E L I H O O D	LOW	Pertambangan Makanan dan Minuman	Keuangan dan Asuransi Telekomunikasi Layanan Air Bersih Listrik dan Gas Konstruksi Industri Pertanian Perikanan Peternakan Perkebunan Kehutanan Transportasi dan pergudangan Perumahan
	HIGH	Pendidikan Pelayanan Masyarakat Kesehatan	Perdagangan (Besar) Perdagangan (UKM) Pariwisata Akomodasi

Era New Normal



Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat



GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGGULANGAN COVID-19
JAWA BARAT



JANGAN ASAL BEKERJA BEGINI PENCEGAHAN COVID-19 BAGI PEKERJA DI ERA NEW NORMAL



sehatnegeriku.kemkes.go.id | Kementerian Kesehatan RI | @KemenkesRI | #KemenkesRI



SELAMA DI TEMPAT KERJA

- 1 Saat tiba, segera cuci tangan
- 2 Gunakan siku untuk menekan tombol lift
- 3 Tidak berkerumun, jaga jarak
- 4 Bersihkan meja/area kerja
- 5 Kurangi menyentuh fasilitas/peralatan bersama
- 6 Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk
- 7 Biasakan tidak berjabat tangan
- 8 Masker tetap digunakan



sehatnegeriku.kemkes.go.id | Kementerian Kesehatan RI | @KemenkesRI | #KemenkesRI



SAAT TIBA DI RUMAH

- 1 Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri
- 2 Cuci pakaian dan masker dengan detergen
▲ Sebelum membuang masker sekali pakai, sobek dan basahi dengan desinfektan
- 3 Bersihkan peralatan seperti handphone, kacamata, tas, jika diperlukan



sehatnegeriku.kemkes.go.id | Kementerian Kesehatan RI | @KemenkesRI | #KemenkesRI



INSPEKTORAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT





OUTLINE

01 – Manajemen Risiko Di Jawa Barat

02 – Penyelenggara MR

03 – Manfaat MR

04 – Aplikasi RAT

05 – Kendala Penerapan MR

06 – Komitmen Inspektorat

07 – Area of Improvement

01

PP 60
Tahun 2008



Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), secara garis besar menyatakan bahwa **setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menerapkan SPIP.**

Salah satu unsur SPIP mengharuskan setiap instansi pemerintah untuk melakukan **penilaian risiko (*risk assessment*)** dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis risiko dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.964-Inspt/2016 tentang **Penerapan Manajemen Risiko Di Daerah Provinsi Jawa Barat**

02

Kepgub Jabar
900/Kep.964-
Inspt/2016



Dalam rangka pengendalian dan pengawasan pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Provinsi Jawa Barat perlu ditetapkan struktur Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri dari:

1. **Komite Manajemen Risiko Provinsi Jawa Barat**, yang melakukan pengendalian **tingkat kebijakan** Provinsi Jawa Barat;
2. **Kepala Perangkat Daerah**, yang melakukan pengendalian **tingkat operasional**;
3. **Inspektorat Provinsi Jawa Barat** sebagai Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*), yang melakukan **pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.**

MANAJEMEN RISIKO DALAM RPJMN 2020-2024

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (PROP)/ PROYEK	INDIKATOR	INDIKASI TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP	50	55	65	75	80
Prop : Perluasan implementasi sistem integritas	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor	100 WBK/	100 WBK/	120 WBK/	140 WBK/	160 WBK/
Evaluasi Zona Integritas	Jumlah unit kerja yang dievaluasi untuk mendapatkan predikat WBK/WBBM	495 Unit Kerja	1000 Unit Kerja	1200 Unit Kerja	1400 Unit Kerja	1600 Unit Kerja
Prop : Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	Persentase Intansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3	- K/L = 20,69% - Prov = 5% - Kab/Kota = 5%	-K/L = 42,53% - Prov = 15% - Kab/Kota = 10%	- K/L = 56,32% - Prov = 30% - Kab/Kota = 15%	- K/L = 68,97% - Prov = 40% - Kab/Kota = 25%	- K/L = 79,31% - Prov = 62% - Kab/Kota = 39%
	Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	35%	40%	45%	50%	55%
	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor SAKIP B Ke atas	94	96	98	100	100
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor SAKIP B Ke atas	85	87	90	100	100
	Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor SAKIP B Ke atas	50	55	65	75	80

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

A. Komite Eksekutif

1. Gubernur selaku Ketua
2. Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Ketua Komite Pelaksana Selaku Anggota

B. Komite Pelaksana

1. Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Ketua
2. Kepala Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat selaku Wakil Ketua
3. Para Kepala Perangkat Daerah yang terkait Selaku Anggota

C. Biro/Bagian pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang menangani urusan yang terkait dengan Administrasi Pembangunan selaku **Sekretariat Komite Manajemen Risiko**

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Pejabat Satu Tingkat Di bawah Kepala Perangkat Daerah

- A. Kabid, Kabag, Kasie
- B. Sekretariat Komite Manajemen Risiko



MANFAAT MANAJEMEN RISIKO

1. Berkurangnya kejutan (*surprises*)

2. Eksploitasi peluang

3. Meningkatnya perencanaan, kinerja, dan efektivitas organisasi

4. Meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan

5. Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan

6. Meningkatnya reputasi

7. Perlindungan bagi pemimpin

8. Meningkatnya akuntabilitas dan *governance* organisasi



APLIKASI RAT (BPKP)



RISK ASSESSMENT TOOLS (RAT)
(Perangkat Pengelolaan Data
Penerapan Manajemen Risiko)



Risk Assessment Tools merupakan alat bantu bagi Pengelola Risiko dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi Risiko, menentukan level Risiko serta menetapkan prioritas Risiko.



Isian Data
Pengelolaan Risiko



Parameter Level Unit 0

Level Unit Penerapan Manajemen Risiko 1

Cari Nama Unit pada RAT

Sasaran Organisasi 2

Struktur Manajemen Risiko 3

Daftar Pemangku Kepentingan (Stakeholder) 4

Profile / Identifikasi Risiko 5

Mitigasi Risiko / Rencana Tindak Pengendalian 6

Evaluasi, Pemantauan dan Review Proses MR 7

E-mail : amnan@di.go.id



Pelaporan
Pengelolaan
Risiko



Piagam Manajemen Risiko - Form I 1

Profile / Identifikasi Risiko - Form II 2

Grafik Peta Risiko 3

Mitigasi Risiko / RTP - Form III 4

Evaluasi, Pemantauan dan Reviu Proses MR - Form IV 5

Grafik Peta Mitigasi / RTP 6



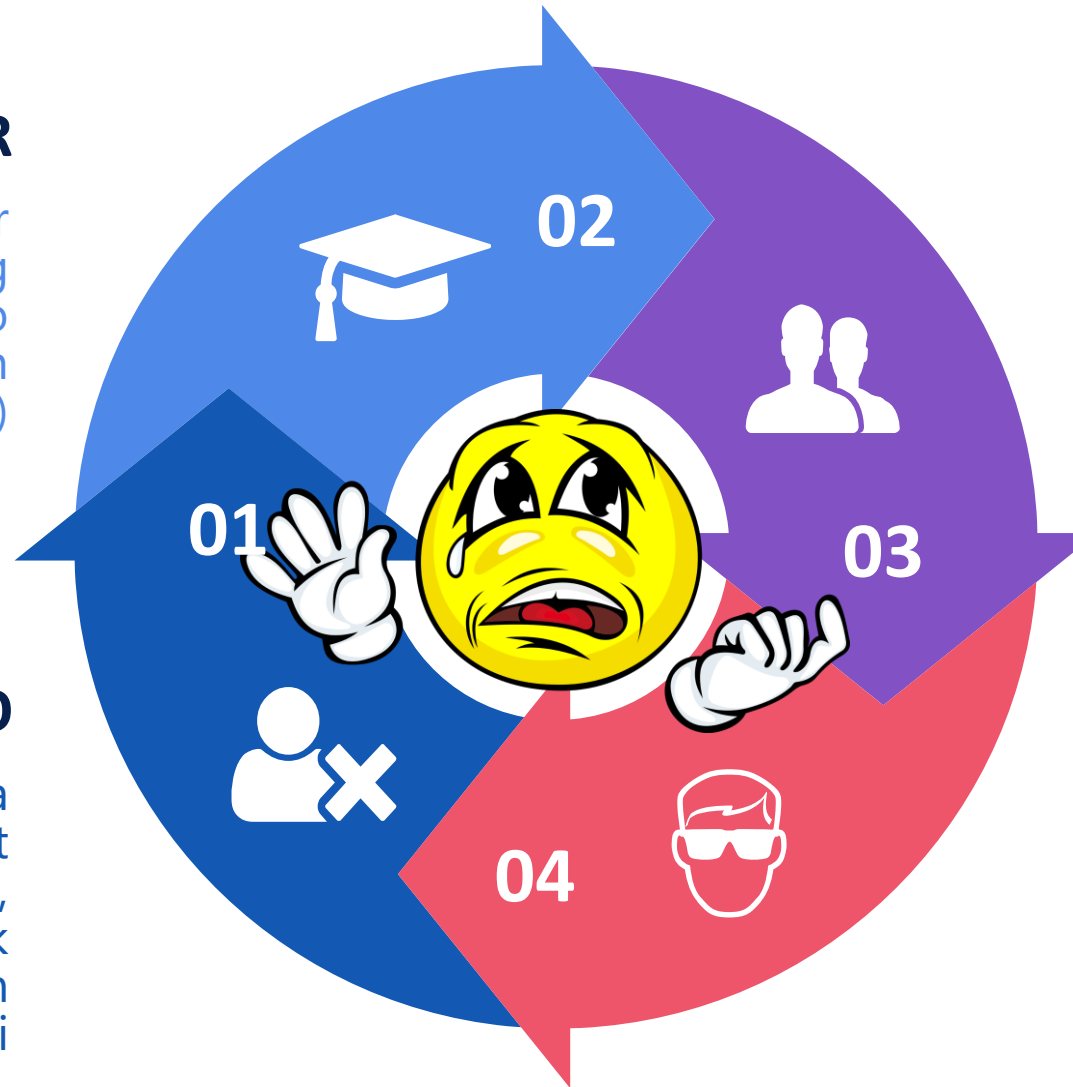
Selesai

KOMPETENSI SDM MR

Kompetensi sumber daya manusia di bidang Manajemen Risiko belum memadai (masih terbatas)

KUANTITAS SDM

Kuantitas SDM yang memahami MR belum sesuai dengan kebutuhan organisasi



BUDAYA SADAR RISIKO

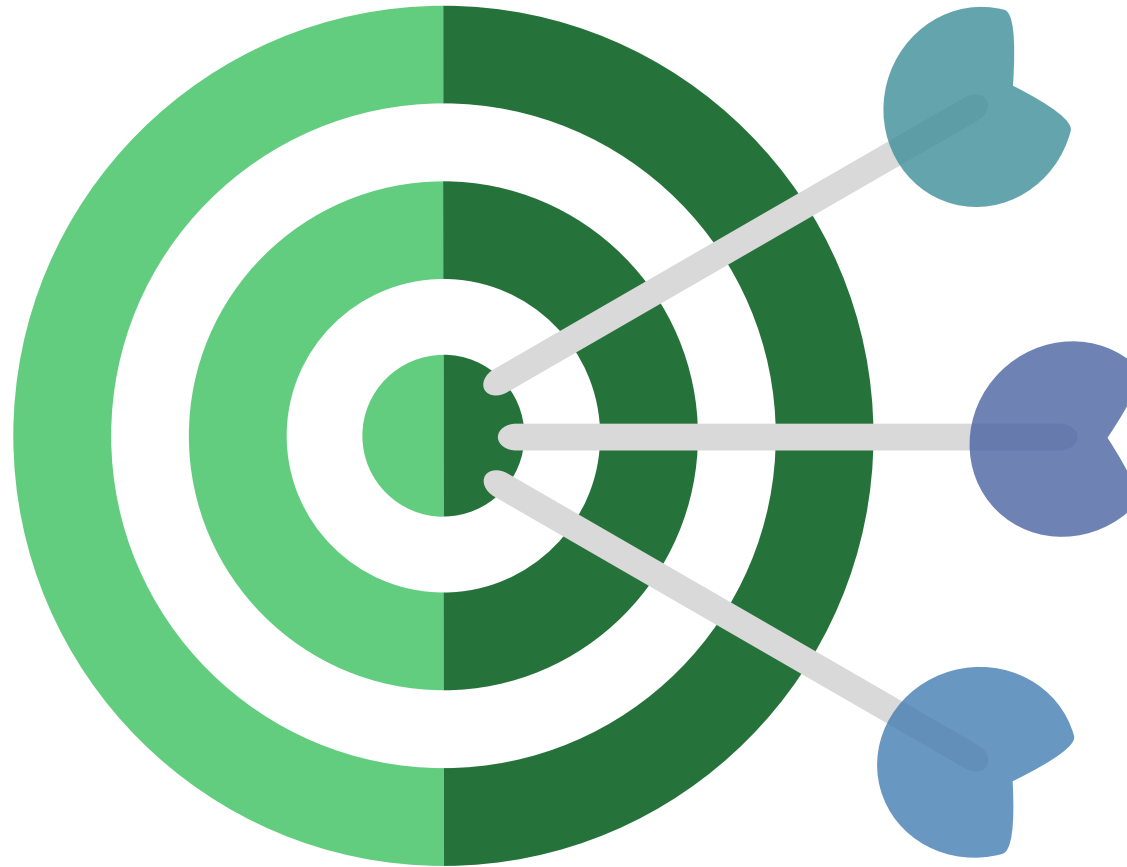
Masih rendahnya budaya sadar risiko, MR belum dilihat sebagai suatu kebutuhan, Komitmen pimpinan puncak (*Tone at the top*) belum memadai

UNIT MANAJEMEN RISIKO

Unit penyelenggara Manajemen Risiko, baik pada level Pemda maupun Perangkat Daerah belum berfungsi dengan baik

KOMITMEN INSPEKTORAT

Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai **Unit Kepatuhan Manajemen Risiko (*Compliance Office for Risk Management*)**, yang melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko memiliki **komitmen untuk mengoptimalkan penerapan Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi Jawa Barat** melalui:



KOMPETENSI SDM

Pada Tahun Anggaran 2020, Inspektorat Provinsi Jawa Barat telah merancang kegiatan untuk melaksanakan **diklat sertifikasi Manajemen Risiko**, namun 1 hari menjelang pelaksanaan muncul regulasi untuk menunda disebabkan wabah Pandemi COVID-19

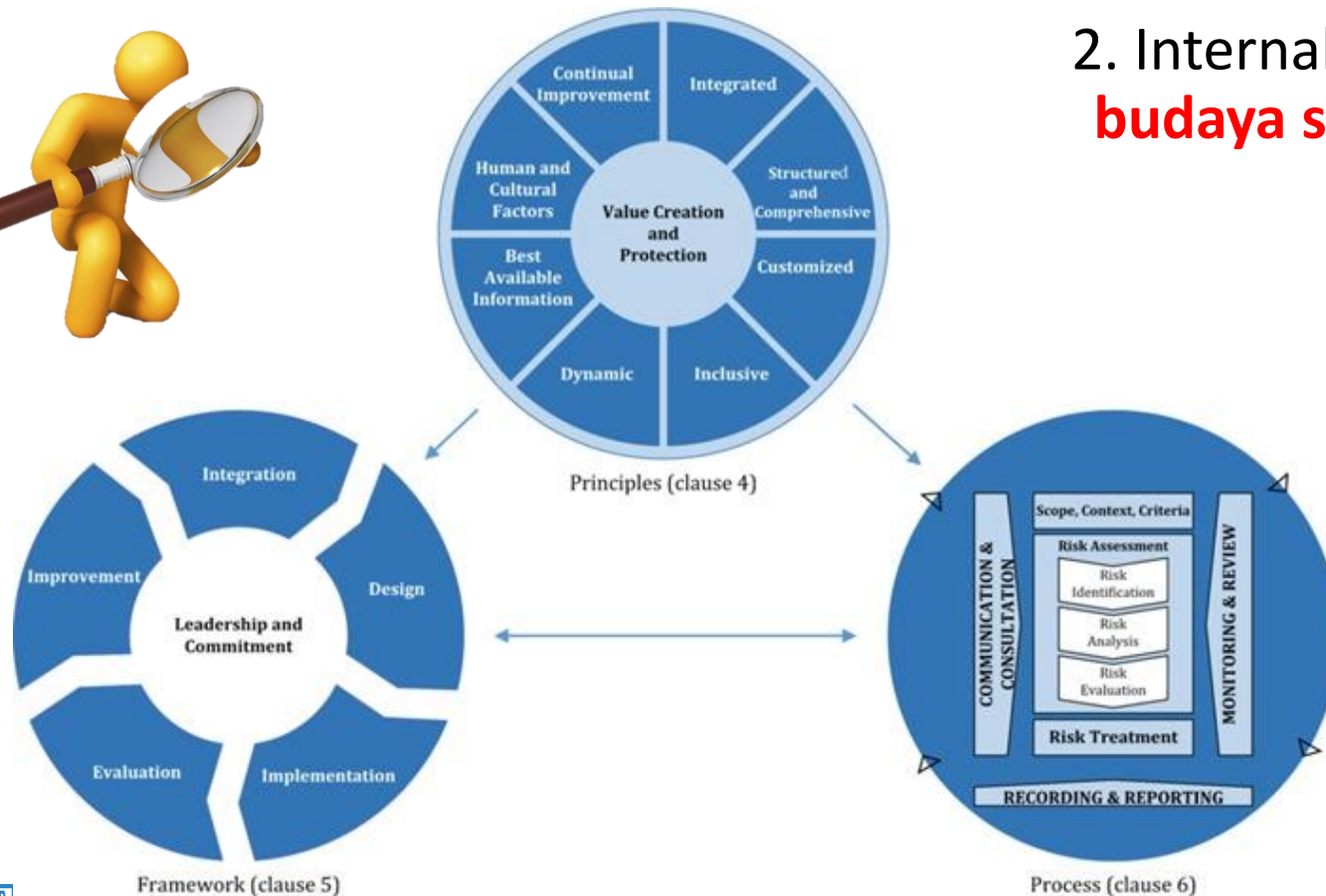
PENINGKATAN MATURITAS MR

Pada Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Provinsi Jawa Barat berupaya meningkatkan Level Maturitas MR melalui **Program & Kegiatan Peningkatan Maturitas MR**

INTEGRASI MR

Sebagai salah satu upaya membangun **budaya sadar risiko**, Inspektorat Provinsi Jawa Barat mendorong **integrasi MR dalam proses perencanaan dan penganggaran** melalui **atensi ke Bappeda** dalam proses **revisi Dokumen Perencanaan**

1. Update **Regulasi**



2. Internalisasi Manajemen Risiko/**Membangun budaya sadar risiko** di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3. Peningkatan **kapasitas sumber daya manusia** Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bidang Manajemen Risiko

TERIMA KASIH

Thank You!

